

# PENDIDIKAN INKLUSIF DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA\*

Oleh: Endis Firdaus

Dosen Universitas Pendidikan Indonesia

## Abstrak

Bahwa pendidikan inklusif sebagai satu inovasi pendidikan bagi para penyandang cacat. Di mana mereka memiliki hak yang sama dengan yang lain untuk hidup layak dengan pendidikan yang memfasilitasi untuk kehidupannya. Maka pendidikan ini merupakan suatu yang menjadi keniscayaan dunia untuk dapat direalisasikan bagi semua bangsa. Bagi Indonesia pendidikan ini sudah merupakan kebutuhan primer bagi rakyat yang selalu dituntut pemerataan dan keadilannya. Implementasi inklusi yang belum mendapat tanggapan serius dari seluruh lapisan masyarakat, memerlukan sosialisasi yang dapat memberikan kejelasan pentingnya hal ini. Walaupun belum menjadi perhatian serius, namun sudah juga ada beberapa pihak yang melirik dan memulai melaksanakannya dalam masyarakat ini.

**Kata Kunci:** *Mainstreaming*, Pendidikan Khusus, Pendidikan Integratif, Pendidikan Luar Biasa.

## Pendahuluan

Pada mulanya pendidikan inklusif merupakan suatu strategi untuk mempromosikan pendidikan universal yang efektif karena dapat menciptakan sekolah yang responsif terhadap beragam kebutuhan aktual dari anak dan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan inklusif menjamin akses dan kualitas. Satu tujuan utama inklusi adalah mendidik anak yang berkebutuhan khusus akibat kecacatannya di kelas reguler bersama-sama dengan anak-anak lain yang non-cacat, dengan dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya, di sekolah yang ada di lingkungan rumahnya. Pernyataan Salamanca (1994) menyatakan bahwa kelas khusus, sekolah khusus atau bentuk-bentuk lain pemisahan anak penyandang cacat dari lingkungan regulernya hanya dilakukan jika hakikat atau tingkat kecacatannya sedemikian rupa sehingga pendidikan di kelas reguler dengan menggunakan alat-alat bantu khusus atau layanan khusus tidak dapat dicapai secara memuaskan. Di samping tidak dapat memfasilitasi direalisasikannya hak-hak asasi manusia di dunia ini.

Dengan dasar Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus (1994) hingga saat ini masih merupakan dokumen internasional utama tentang prinsip-prinsip dan praktek Pendidikan Inklusif. Dokumen ini mengemukakan beberapa prinsip dasar inklusi yang fundamental, yang belum dibahas dalam dokumen-dokumen internasional sebelumnya. Beberapa konsep inti Inklusi yang tercantum dalam Pernyataan Salamanca itu meliputi: Anak-anak memiliki keberagaman yang luas dalam karakteristik dan kebutuhannya. Perbedaan itu normal adanya. Sekolah perlu mengakomodasi semua anak. Anak penyandang cacat seyogyanya

---

\* Disampaikan dalam Seminar Nasional Pendidikan di Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto, 24 Januari 2010

bersekolah di lingkungan sekitar tempat tinggalnya sekaligus sebagai penampakan dari realitas dunia kehidupannya dalam bentuk mikro di Sekolah.

Yang perlu mendapat perhatian adalah pengajaran yang terpusat pada diri anak merupakan inti dari inklusi. Kurikulum yang fleksibel seyogyanya disesuaikan dengan anak, bukan kebalikannya. Inklusi memerlukan sumber-sumber dan dukungan yang tepat. Inklusi itu penting bagi harga diri manusia dan pelaksanaan hak azazi manusia secara penuh. Sekolah inklusif memberikan manfaat untuk semua anak karena membantu menciptakan masyarakat yang inklusif. Inklusi meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya pendidikan. Dengan mengimplementasikan pendidikan inklusif, sekurang-kurangnya kita tidak perlu membangun infrastruktur baru guna menyekolahkan anak berkebutuhan khusus seperti selama ini ada dalam berbagai kebijakan pendidikan di berbagai Negara.

Dapat kita lihat seperti pada satu paragraf dalam Pasal 2 Pernyataan Salamanca memberikan argumen yang sangat baik untuk sekolah inklusif: “Sekolah reguler dengan orientasi inklusif merupakan cara yang paling efektif untuk memerangi sikap diskriminatif, menciptakan masyarakat yang terbuka, membangun suatu masyarakat inklusif dan mencapai pendidikan untuk semua; lebih dari itu, sekolah inklusif memberikan pendidikan yang efektif kepada mayoritas anak dan meningkatkan efisiensi sehingga menekan biaya untuk keseluruhan sistem pendidikan.” Terlebih bagi Indonesia yang beberapa tahun terakhir ini segala lapisan masyarakat menyoroti pemerataan pendidikan bagi semua rakyat yang difasilitasi oleh Negara dan dilindungi Undang-undang Dasar 1945.

### **Pembentukan Pendefinisian Pendidikan Inklusif**

Memiliki pemahaman yang jelas tentang pendidikan inklusif itu penting karena tergantung pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mendasari pemahaman itu, hasilnya dapat sangat berbeda. Jika pendidikan inklusif didefinisikan secara sempit, atau didasarkan pada asumsi ‘anak sebagai masalah’ dan jika kemudian definisi tersebut digunakan untuk mengembangkan atau memonitor prakteknya, maka pendidikan inklusif akan gagal atau tidak berkesinambungan.

Definisi pendidikan inklusif juga terus-menerus berkembang sejalan dengan semakin mendalamnya renungan orang terhadap praktek yang ada, dan sejalan dengan dilaksanakannya pendidikan inklusif dalam berbagai budaya dan konteks yang semakin luas. Definisi pendidikan inklusif harus terus berkembang jika pendidikan inklusif ingin tetap menjadi jawaban yang riil dan berharga untuk mengatasi tantangan pendidikan dan hak asasi manusia. Akhirnya, mendefinisikan pendidikan inklusif itu penting karena banyak orang masih menganggap bahwa pendidikan inklusif hanya merupakan versi lain dari PLB (Pendidikan Luar Biasa). Konsep utama dan asumsi yang melandasi pendidikan inklusif adalah justru dalam berbagai hal bertentangan dengan konsep dan asumsi yang melandasi ‘pendidikan luar biasa’(Stubbs, 2002:38).

**“Inklusi atau Pendidikan Inklusif bukan nama lain untuk ‘pendidikan kebutuhan khusus’. Pendidikan inklusif menggunakan pendekatan yang berbeda dalam mengidentifikasi dan mencoba memecahkan kesulitan yang muncul di sekolah .... pendidikan kebutuhan khusus dapat menjadi hambatan bagi perkembangan praktek inklusi di sekolah.”** (Stubbs, 2002:38).

Konsep pendidikan inklusif memiliki lebih banyak kesamaan dengan konsep yang melandasi gerakan 'Pendidikan untuk Semua' dan 'Peningkatan mutu sekolah'. Pendidikan inklusif merupakan pergeseran dari kecemasan tentang suatu kelompok tertentu menjadi upaya yang difokuskan untuk mengatasi hambatan untuk belajar dan berpartisipasi (Stubbs, 2002:38).

### **Beberapa definisi Pendidikan Inklusif**

Definisi Pendidikan Inklusif yang dirumuskan dalam **Seminar Agra** disetujui oleh 55 peserta dari 23 negara (terutama dari 'Selatan') pada tahun 1998. Definisi ini kemudian diadopsi dalam *South African White Paper on Inclusive Education* dengan hampir tidak mengalami perubahan:

#### **Definisi Seminar Agra dan Kebijakan Afrika Selatan Pendidikan Inklusif:**

- 1) Lebih luas daripada pendidikan formal: mencakup pendidikan di rumah, masyarakat, sistem nonformal dan informal.
- 2) Mengakui bahwa semua anak dapat belajar.
- 3) Memungkinkan struktur, sistem dan metodologi pendidikan memenuhi kebutuhan semua anak.
- 4) Mengakui dan menghargai berbagai perbedaan pada diri anak: usia, jender, etnik, bahasa, kecacatan, status HIV/AIDS dll.
- 5) Merupakan proses yang dinamis yang senantiasa berkembang sesuai dengan budaya dan konteksnya.
- 6) Merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mempromosikan masyarakat yang inklusif (Stubbs, 2002:39-40).

**“Inklusi dalam pendidikan merupakan proses peningkatan partisipasi siswa dan mengurangi keterpisahannya dari budaya, kurikulum dan komunitas sekolah setempat.”**

Inklusi juga melibatkan:

1. Restrukturisasi budaya, kebijakan dan praktek untuk merespon terhadap keberagaman siswa dalam lingkungannya;
2. Pembelajaran dan partisipasi semua anak yang rentan akan tekanan eksklusi (bukan hanya siswa penyandang cacat);
3. Meningkatkan mutu sekolah untuk stafnya maupun siswanya;
4. Mengatasi hambatan akses dan partisipasinya;
5. Hak siswa untuk dididik di dalam lingkungan masyarakatnya;
6. Memandang keberagaman sebagai kekayaan sumber, bukan sebagai masalah;
7. Saling memelihara hubungan antara sekolah dan masyarakat;
8. Memandang pendidikan inklusif sebagai satu aspek dari Masyarakat Inklusif.

Konsep inklusi dan eksklusi saling terkait "karena proses peningkatan partisipasi siswa menuntut adanya pengurangan tekanan untuk mempraktekkan eksklusi." (Stubbs, 2002:40).

**“Pendidikan Inklusif telah berkembang sebagai suatu gerakan untuk menantang kebijakan dan praktek eksklusi ... .”**

**“Inklusi dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan.”**

Definisi-definisi mutakhir lainnya juga menekankan bahwa pendidikan inklusif dimaksudkan untuk SEMUA anak:

**“Sebuah sekolah yang mempraktekkan pendidikan inklusif merupakan sekolah yang memperhatikan pengajaran dan pembelajaran, pencapaian, sikap dan kesejahteraan setiap anak.”**

**“Sekolah yang efektif adalah sekolah yang mempraktekkan pendidikan inklusif .”**

Definisi yang dikutip di atas menggambarkan suatu model pendidikan inklusif yang didasarkan pada berbagai konsep utama tentang sistemnya, stakeholder utamanya, proses dan sumber dayanya.

## **Konsep-konsep Utama yang terkait dengan Pendidikan Inklusif**

### **a. Konsep-konsep tentang anak**

1. Semua anak berhak memperoleh pendidikan di dalam komunitasnya sendiri.
2. semua anak dapat belajar, dan siapapun dapat mengalami kesulitan dalam belajar
3. semua anak membutuhkan dukungan untuk belajar.
4. pengajaran yang terfokus pada anak bermanfaat bagi SEMUA anak (Stubbs, 2002:41-42).

### **b. Konsep-konsep tentang sistem pendidikan dan persekolahan**

- Pendidikan lebih luas dari pada persekolahan formal
- Sistem pendidikan yang fleksibel dan responsif
- Lingkungan pendidikan yang memupuk kemampuan dan ramah
- Peningkatan mutu sekolah – sekolah yang efektif
- Pendekatan sekolah yang menyeluruh dan kolaborasi antarmitra.

### **c. Konsep-konsep tentang keberagaman dan diskriminasi**

- Memberantas diskriminasi dan tekanan untuk mempraktekkan eksklusi
- Merespon/merangkul keberagaman sebagai sumber kekuatan, bukan masalah
- Pendidikan inklusif mempersiapkan siswa untuk masyarakat yang menghargai dan menghormati perbedaan

### **d. Konsep-konsep tentang proses untuk mempromosikan inklusi**

- Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan inklusi
- Meningkatkan partisipasi nyata bagi semua orang
- Kolaborasi, kemitraan
- Metodologi partisipatori, Penelitian tindakan, penelitian kolaboratif

### **e. Konsep-konsep tentang sumber daya**

- Membuka jalan ke sumber daya setempat
- Redistribusi sumber daya yang ada
- Memandang orang (anak, orangtua, guru, anggota kelompok termarginalisasi dll) sebagai sumber daya utama
- Sumber daya yang tepat yang terdapat di dalam sekolah dan pada tingkat lokal dibutuhkan untuk berbagai anak, misalnya Braille, alat asistif (Stubbs, 2002:42-43).

## **Pendidikan Luar Biasa, Integrasi, *Mainstreaming*, Unit Kecil dan Pendidikan Inklusif – Apa Bedanya?**

Pengaruh pendidikan luar biasa terhadap perkembangan pendidikan inklusif telah dibahas di muka. Sejauh tertentu, adanya bermacam-macam istilah ini mencerminkan sejarah perkembangan pendidikan inklusif, khususnya di negara-negara Utara atau negara-negara yang dipengaruhi oleh kebijakan dan praktek dari Utara. Tetapi di pihak lain, kesemua istilah tersebut kini masih diimplementasikan dan dipromosikan, dan perbedaan antara istilah-istilah tersebut jarang sekali dipahami. Pihak donor dan para pembuat kebijakan perlu memahami perbedaannya, karena hasil jangka panjangnya akan sangat berbeda.

Pertama-tama, penting untuk difahami bahwa istilah-istilah tersebut memiliki banyak kesamaan konsep yang positif, misalnya:

1. Semua anak, termasuk anak penyandang cacat, berhak atas pendidikan.
2. Adanya komitmen untuk menemukan cara membantu anak yang belajar dengan cara dan kecepatan yang berbeda-beda agar benar-benar dapat belajar.
3. Mempromosikan perkembangan potensi individu anak secara holistik: secara fisik, linguistik, sosial, kognitif, sensori.
4. Mendukung bermacam-macam metoda komunikasi untuk penyandang berbagai kecacatan (Bahasa isyarat, Braille, papan tanda, bicara dengan bantuan komputer, Makaton, dll).

Sekarang mari kita telaah perbedaan antara tiap istilah tersebut (**Stubbs, 2002:43**).

**Pendidikan Luar Biasa (mencakup sekolah luar biasa, kebutuhan pendidikan khusus, kebutuhan khusus) Pendidikan luar biasa berasumsi bahwa terdapat** kelompok anak yang terpisah yang memiliki ‘kebutuhan pendidikan khusus’ dan seringkali disebut ‘anak berkebutuhan khusus’.

**ASUMSI INI TIDAK BENAR** karena:

1. Anak manapun dapat mengalami kesulitan dalam belajar
2. Banyak anak penyandang cacat tidak memiliki masalah dalam belajar, hanya mengalami masalah dalam aksesnya, namun mereka masih diberi label ‘anak berkebutuhan khusus’
3. Anak yang memiliki kecacatan intelektual seringkali dapat belajar dengan sangat baik dalam bidang tertentu atau pada tahap tertentu dalam hidupnya.

**Pendidikan luar biasa** tidak mendefinisikan istilah ‘khusus’. Pada kenyataannya, yang sering disebut ‘khusus’ merupakan kebutuhan belajar yang umum saja. Misalnya, kebutuhan untuk dapat memahami apa yang dikatakan guru, untuk dapat mengakses bahan bacaan, untuk dapat masuk ke dalam bangunan sekolah.

**Pendidikan luar biasa meyakini bahwa ‘metode khusus’, ‘guru khusus’, ‘lingkungan khusus’ dan ‘peralatan khusus’ diperlukan untuk mengajar ‘anak luar biasa’.** Ini SALAH – yang disebut metode khusus itu sering kali tidak lebih dari sekedar metoda berkualitas baik yang difokuskan pada kebutuhan anak. Setiap anak butuh belajar dengan dukungan dan dalam lingkungan yang kondusif.

**Pendidikan luar biasa memandang anak sebagai yang bermasalah**, bukan sistemnya atau gurunya. SALAH—dengan ditempatkan pada lingkungan yang tepat dan diberi dorongan, anak pasti akan mau belajar. Jika anak tidak mau belajar, maka guru dan lingkungannya itulah yang membuat anak itu gagal.

**Pendidikan luar biasa mendefinisikan keseluruhan individu anak** berdasarkan kecacatannya dan mengelompokkannya berdasarkan kecacatannya itu. SALAH – Pada kenyataannya kecacatan hanya merupakan satu bagian saja dari diri anak. Sebagian besar kualitas dan karakteristik anak penyandang cacat sama dengan anak pada umumnya – membutuhkan teman, butuh dilibatkan, dicintai, ambil bagian dalam masyarakatnya (Stubbs, 2002:44).

**Pendidikan luar biasa ingin membuat anak** menjadi ‘normal’ bukannya menghargai kekuatan dan karakteristik yang dimilikinya. Ini dapat mengakibatkan penekanan yang tidak semestinya untuk membuat anak berbicara atau berjalan, meskipun hal itu tidak realistis dan dapat mengakibatkan perasaan sakit yang tak semestinya.

### **Pendidikan Integrasi**

Ini merupakan istilah yang paling banyak dipergunakan masyarakat untuk menggambarkan **proses memasukkan anak penyandang cacat ke dalam sekolah reguler** (juga disebut *mainstreaming*, terutama di Amerika Serikat). Pendidikan Integrasi berbeda dengan Pendidikan Inklusif dalam hal:

1. Fokusnya masih pada individu anak, bukan pada sistem. Anak dipandang sebagai masalah dan harus ‘disiapkan’ untuk integrasi, bukan sekolahnya yang disiapkan.
2. Integrasi sering hanya mengacu pada proses geografis - memindahkan anak secara fisik ke sekolah reguler. Integrasi mengabaikan masalah-masalah seperti apakah anak benar-benar belajar, diterima atau dilibatkan dalam kegiatan kelasnya.
3. Sebagian besar sumber daya dan metode difokuskan pada individu anak, bukan pada keterampilan guru atau sistemnya.
4. Anak yang ‘diintegrasikan’ akan dibiarkan untuk mengatasi sendiri sistem sekolah reguler yang kaku tanpa dukungan atau akan memperoleh perhatian khusus yang memisahkannya dari teman-teman sekelasnya.
5. Jika anak putus sekolah, tinggal kelas bertahun-tahun, atau terasing, maka ini semua dianggap sebagai kesalahan anak itu sendiri; ‘dia **tidak dapat mengikuti** kurikulum, **tidak dapat berjalan** sendiri ke sekolah, **tidak tahan terhadap** komentar anak-anak lain’.
6. Integrasi biasanya terfokus pada sekelompok anak tertentu, seperti mereka yang memiliki kecacatan ringan, dan tidak akan memandang bahwa semua anak dapat diintegrasikan.
7. Walaupun didasarkan pada konsep yang serupa dengan pendidikan luar biasa yang segregatif, pendidikan integrasi pada prakteknya sering dipandang sebagai perintis jalan menuju inklusi dan dapat mengarah pada perubahan sistem (Stubbs, 2002:45-46).

### **Mainstreaming**

Istilah ini sering dipergunakan seperti halnya inklusi atau integrasi. Akan tetapi, istilah ini juga umum dipergunakan dalam kaitannya dengan isu-isu lain seperti jender dan hak anak di dalam kebijakan pembangunan secara umum. Dalam hal ini, *mainstreaming* dapat diartikan sebagai **suatu proses politik untuk membawa suatu isu dari tepi ke tengah (*mainstream*)**, agar diterima oleh mayoritas. Ini dapat diartikan sebagai mengupayakan agar suatu isu masuk ke dalam agenda, dan mengubah kesadaran orang dari memandangnya sebagai hal kecil menjadi

permasalahan inti dalam suatu perdebatan. Dalam hal ini, membuat isu kecacatan menjadi persoalan penting dalam perdebatan tentang Pendidikan untuk Semua dan Peningkatan mutu sekolah merupakan suatu tujuan yang sangat penting (Stubbs, 2002:46).

## **Implementasi Pendidikan Inklusif di Indonesia**

Proses menuju pendidikan inklusif di Indonesia diawali pada awal tahun 1960-an oleh beberapa orang siswa tunanetra di Bandung dengan dukungan organisasi para tunanetra sebagai satu kelompok penekan. Pada masa itu SLB untuk tunanetra hanya memberikan layanan pendidikan hingga ke tingkat SLTP. Sesudah itu para pemuda tunanetra diberi latihan kejuruan dalam bidang kerajinan tangan atau pijat. Sejumlah pemuda tunanetra bersikeras untuk memperoleh tingkat pendidikan lebih tinggi dengan mencoba masuk ke SMA biasa meskipun ada upaya penolakan dari pihak SMA itu. Lambat-laun terjadi perubahan sikap masyarakat terhadap kecacatan dan beberapa sekolah umum bersedia menerima siswa tunanetra.

Pada akhir tahun 1970-an pemerintah mulai menaruh perhatian terhadap pentingnya pendidikan integrasi, dan mengundang Helen Keller International, Inc. untuk membantu mengembangkan sekolah integrasi. Keberhasilan proyek ini telah menyebabkan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan nomor 002/U/1986 tentang Pendidikan Terpadu bagi Anak Cacat yang mengatur bahwa anak penyandang cacat yang memiliki kemampuan seyogyanya diberi kesempatan untuk belajar bersama-sama dengan sebayanya yang non-cacat di sekolah biasa. Sayangnya, ketika proyek pendidikan integrasi itu berakhir, implementasi pendidikan integrasi semakin kurang dipraktekkan, terutama di jenjang SD.

Akan tetapi, menjelang akhir tahun 1990-an upaya baru dilakukan lagi untuk mengembangkan pendidikan inklusif melalui proyek kerjasama antara Depdiknas dan pemerintah Norwegia di bawah manajemen Braillo Norway dan Direktorat PLB. Agar tidak mengulangi kesalahan di masa lalu dengan program pendidikan integrasi yang nyaris mati, perhatian diberikan pada sustainabilitas program pengimplementasian pendidikan inklusif.

Untuk itu, strategi yang diambil adalah sebagai berikut.

1. Diseminasi ideologi pendidikan inklusif melalui berbagai seminar dan lokakarya;
2. Mengubah peranan SLB yang ada agar menjadi pusat sumber untuk mendukung sekolah inklusif (dengan alat bantu mengajar, materi ajar, metodologi, dsb.); Penataran/pelatihan bagi guru-guru SLB maupun guru-guru reguler untuk memungkinkan mereka memberikan layanan yang lebih baik kepada anak berkebutuhan khusus dalam setting inklusi;
3. Reorientasi pendidikan guru di LPTK dan keterlibatan universitas dalam program tersebut;
4. Desentralisasi pembuatan keputusan untuk memberikan lebih banyak peran kepada pemerintah daerah dalam implementasi pendidikan inklusif;
5. Mendorong dan memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok kerja untuk mempromosikan implementasi pendidikan inklusif;
6. Keterlibatan LSM dan organisasi internasional dalam program ini;
7. Menjalin jejaring antar berbagai pihak terkait;
8. Mengembangkan sekolah inklusif perintis;

9. Pembukaan program magister dalam bidang inklusi dan pendidikan kebutuhan khusus.

Hasil yang paling dapat teramati dari program tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Sejumlah lokakarya dan seminar tentang pendidikan inklusif, baik pada tingkat nasional maupun lokal, telah diselenggarakan, yang melibatkan para pendidik dan pengelola pendidikan.
- 2) Sembilan SLB di sembilan provinsi telah dipilih untuk menjadi pusat sumber dan peranannya sebagai pusat sumber sedikit demi sedikit menjadi kenyataan dengan tetap mempertahankan peranannya sebagai SLB. *The National Resource Centre in Jakarta, Citeureup Regional Resource Centre in West Java and Payakumbuh Regional Resource Centre in West Sumatra are the three most functional among the nine resource centres. In addition, a number of other special schools have been designed to function as supportive centres.*
- 3) Beberapa universitas sudah mulai memperkenalkan pendidikan inklusif sebagai satu mata kuliah atau sebagai satu topik dalam mata kuliah terkait kepada mahasiswanya.
- 4) Dosen sejumlah universitas sudah terlibat dalam lokakarya atau seminar tentang pendidikan inklusif.
- 5) Dinas Pendidikan di sejumlah propinsi sudah lebih proaktif dalam mempromosikan pendidikan inklusif.
- 6) Sebuah kelompok kerja pendidikan inklusif telah terbentuk di Jawa Barat, yang anggotanya berasal dari Pusat Sumber Citeureup, Dinas Pendidikan Jawa Barat, dan UPI.
- 7) UNESCO telah aktif terlibat dalam promosi pendidikan inklusif di Jawa Barat.
- 8) Pada tahun 2002 proyek telah mengembangkan masing-masing tiga sekolah inklusif perintis di 9 propinsi yang memiliki Pusat Sumber, , dan pada tahun 2003 Depdiknas secara ambisius meningkatkan jumlah tersebut. Sejak saat itu sekitar 2000 anak penyandang cacat sudah ditempatkan did sekolah reguler.
- 9) Program magister inklusi dan pendidikan kebutuhan khusus dibuka di UPI dengan bantuan teknis dari Universitas Oslo.
- 10) Namun yang telah benar-benar melaksanakan pendidikan inklusif secara eksklusif telah dilaksanakan seperti antara lain di Sekolah Al-Falah Cibubur Jakarta Timur sejak 1996 yang sekaligus dilaksanakan sekolah tersebut dalam programnya besarnya yang dikenal dengan *Beyond Centre and Central Times (BCCT)* dalam kerjasamanya dengan *Thalahassee Creative School Florida US*.
- 11) Sebagai salah satu implementasi itu telah dilaksanakan Lokakarya Nasional tentang Pendidikan Inklusif yang diselenggarakan di Bandung, Indonesia tanggal 8-14 Agustus 2004 dan membuat deklarasi nasional dan menghimbau kepada pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha dan industri serta masyarakat untuk dapat:
  1. Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya mendapatkan kesamaan akses dalam segala aspek kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan, keamanan, maupun bidang lainnya, sehingga menjadi generasi penerus yang handal.
  2. Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya, sebagai individu yang bermartabat, untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan potensi dan tuntutan masyarakat, tanpa perlakuan deskriminatif yang merugikan eksistensi kehidupannya baik secara fisik, psikologis, ekonomis, sosiologis, hukum, politis maupun kultural.

3. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengelolaan pendidikan inklusif yang ditunjang kerja sama yang sinergis dan produktif di antara para stakeholders, terutama pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha dan industri, orang tua serta masyarakat.
4. Menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pemenuhan anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya, sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan keunikan potensinya secara optimal.
5. Menjamin kebebasan anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya untuk berinteraksi baik secara reaktif maupun proaktif dengan siapapun, kapanpun dan di lingkungan manapun, dengan meminimalkan hambatan.
6. Mempromosikan dan mensosialisasikan layanan pendidikan inklusif melalui media masa, forum ilmiah, pendidikan dan pelatihan, dan lainnya secara berkesinambungan.
7. Menyusun Rencana Aksi (Action Plan) dan pendanaannya untuk pemenuhan aksesibilitas fisik dan non-fisik, layanan pendidikan yang berkualitas, kesehatan, rekreasi, kesejahteraan bagi semua anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya.

Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab untuk Menuju Pendidikan Inklusif di Indonesia (Bandung, 11 Agustus 2004).

## **Kesimpulan**

Pendidikan inklusif sebagai satu inovasi pendidikan bagi penyandang cacat. Pertama kali pendidikan ini muncul dalam dokumen internasional adalah pada tahun 1994 dalam *The Salamanca Statement*. Kini pendekatan ini belum sepenuhnya diterapkan di seluruh dunia, tetapi kecenderungannya adalah semakin dapat diterima oleh masyarakat luas. Satu faktor yang tampaknya menentukan penerimaan masyarakat terhadap ideologi pendidikan inklusif ini adalah difusi inovasi ini. Maksud dari semua ide adalah kesejahteraan para penyandang cacat yang memperoleh segala haknya sebagai warga negara. Apakah penempatan anak-anak penyandang cacat di sekolah reguler saat ini akan benar-benar baik bagi kesejahterannya, kita membutuhkan waktu untuk membuktikannya; tetapi kita dapat percaya itu akan terjadi selama mereka diberi dukungan yang tepat sebagaimana dirancang bagi mereka. Hingga saat ini yang tampaknya pasti adalah jumlah anak penyandang cacat yang bersekolah telah meningkat secara signifikan, sehingga target untuk mewujudkan Pendidikan untuk Semua pada tahun 2015 tampaknya menjadi lebih realistis. Walaupun implementasinya di Indonesia masih belum tampak kesungguhan upaya yang signifikan baik oleh Negara maupun masyarakat dan lembaga pendidikan terkait.

## Referensi

- A Chance in Life: Principles and Practice in Basic Primary Education for Children (SCF 1998)*  
Kimberley Ogadhoh & Marion. Mofteno ISBN No: 1899120 69 6. SCF's Publication Sales.
- Ainscow and Booth (1998) *From Them to Us*. London: Routledge
- Ainscow M (1991) *Effective Schools for All*. London: Fulton
- Ainscow M (2001) *Understanding the Development of Inclusive Schools: Some Notes and Further Reading*
- Convention on the Rights of the Child. United Nations General Assembly resolution 44/25, 20 November 1989.*
- Daunt P, in Mittler et al (1993) *Special Needs Education*. London: Kogan Page
- Graham Brown, S (1991) *Education in the Developing World: Conflict and Crisis*. Harlow: Longman Group UK Ltd
- Johnsen, B. H. & Skjorten, M. D. (2001). *Education - Special Needs Education: An Introduction*. Oslo: Unipub forlag
- Jomtien, Thailand: The World Bank, UNESCO, UNICEF & UNDP.
- Kisanji J (1993), *In Mittler et al (1993) Special Needs Education*. London: Kogan Page
- Kisanji, J (1998) *Culture and Disability: An analysis of Inclusive Education Based on African Folklore*. the International Expert Meeting and Symposium on Local Concepts and Beliefs of Disability in Different Cultures, Bonn, Germany.
- Kisanji, J (1999) *Models of Inclusive Education: Where do Community Based Support Programmes Fit In?* , the Workshop on 'Inclusive Education in Namibia: The Challenge for Teacher Education', Windhoek, Namibia.
- Olusanya (1983) *The Situation of Disabled Persons in Africa*. Economic Commission for Africa
- Pereira and Seabrook (1990) *Asking the Earth: The Spread of Unsustainable Development*. London: Earthscan Publications
- Rogers, E. M. with Shoemaker, F. F. (1971). *Diffusion of Innovation*. New York: The Free Press.
- Stubbs, Sue. (2002). *Inclusive Education Where There Are Few Resources*. Norway: The Atlas Alliance.

Stubs, S. (2002). *Inclusive Education Where There Are Few Resources*. Oslo: The Atlas Alliance.

Tarsidi, D. (2003). *The implementation of Inclusive Education in Indonesia*. Makalah disajikan pada The 8th International Congress on Including Children with Disabilities in the Community. Stavanger, Norway, 15-17 Juni 2003.

The Council for Exceptional Children (1993). *Including Students with Disabilities in General Classrooms*. ERIC EC Digest #E521. The ERIC Clearing House on Disabilities and Gifted Education.

The World Declaration on Education For All (1990). *Meeting Basic Learning Needs*.

World Conference On Special Needs Education: Access And Quality (1994). *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education*. Salamanca: UNESCO & Ministry Of Education And Science, Spain.

# **PENDIDIKAN INKLUSIF DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

**Makalah:**

Disampaikan dalam Seminar Nasional Pendidikan  
di Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto,  
24 Januari 2010

**Oleh: Dr. Endis Firdaus, M.Ag.  
Dosen Universitas Pendidikan Indonesia**